

Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi Fiskal

Rahmat¹, Yollit Permata Sari S.E, M.Si ²

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia

*Korespondensi: zerahmat76@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

08 Agustus 2025

Disetujui:

15 Agustus 2025

Terbit daring:

17 Agustus 2025

DOI: -

Sitasi:

Rahmat, A N & Yollit Permata Sari S.E, M.Si (2025). Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Pada Era Desentralisasi Fiskal

Abstract:

Economic growth is one of the indicators used to measure a country's success. The government plays an important role in accelerating economic growth. The government implements various policies to increase economic growth. One part of fiscal policy is government spending, which the government uses to regulate the economy by determining its revenue and expenditure each year. The purpose of this study is to determine the quality of regional financial independence, the quality of regional financial effectiveness, the quality of regional financial efficiency on the economic growth of West Sumatra Province in the era of fiscal decentralization. The method in this study uses a quantitative method, using time series data, This study focuses on districts/cities in West Sumatra Province. The results of this study are that the level of effectiveness has a negative and insignificant effect on economic growth. The level of efficiency has a positive and significant effect on economic growth. The level of independence has a negative and significant effect on economic growth in West Sumatra Province and vice versa. The variables of effectiveness ratio, efficiency ratio, independence ratio of regional financial management, revenue growth acceleration ratio and simultaneously have a significant influence with a positive direction on economic growth in West Sumatra Province. The conclusion of this study means that the three independent variables together are able to increase economic growth in West Sumatra Province. A statistical model explains 47% of the dependent variable, namely economic growth, through independent variables. The independent variables are effectiveness, efficiency, and independence. The remaining 53% is explained by factors outside the model.

Keywords: Financial Management, Economic Growth

Abstrak:

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu negara. Pemerintah memegang peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu bagian dari kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah, yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluarannya setiap tahun. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui kualitas kemandirian keuangan daerah, kualitas efektivitas keuangan daerah, kualitas efisiensi keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dalam era desentralisasi fiskal. Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data time series, Penelitian ini fokus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hasil Pada penelitian ini adalah Tingkat Efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Tingkat efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat Begitu sebaliknya. Variabel rasio efektivitas, rasio efisiensi, indeks kemandirian fiskal daerah rasio percepatan pertumbuhan pendapatan dan secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan pada penelitian ini artinya ketiga variabel independen tersebut secara bersama-sama mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Sebanyak 47 % variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel independent dengan model statistik. Adapun variabel independennya adalah tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, dan tingkat kemandirian.. Sedangkan 53 % sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya diluar model.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, pertumbuhan ekonomi.

Kode Klasifikasi JEL: O40, L95, L96

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan bagi perekonomian suatu negara, yang mengharuskannya mencapai kondisi yang lebih baik dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas produksi ekonomi, yang dibuktikan dengan peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur yang paling berarti dalam studi ekonomi makro. Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi menandakan bagaimana aktivitas ekonomi dapat menciptakan perubahan dalam struktur sosial masyarakat yang menghasilkan tambahan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat (Widiaty & Nugroho, 2020).

Meskipun perekonomian dunia mulai pulih pada tahun 2021, namun masih terdampak oleh penyebaran virus varian delta dan omicron, serta masalah rantai pasokan. Sebaliknya, berbagai kebijakan telah diterapkan oleh berbagai negara. Misalnya, Eropa dan AS telah meningkatkan tuntutan akan ekonomi yang ramah lingkungan, dan China serta negara-negara produsen lainnya telah membatasi produksi untuk beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dari keberhasilan suatu negara. Dalam konteks ini, pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong kemajuan ekonomi. Salah satu aspek kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah, yang mengelola perekonomian dengan mengatur pendapatan dan pengeluaran setiap tahunnya. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah.

Menurut data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata antara 5% dan 6% per tahun dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, Sumatera Barat tumbuh sekitar 5,14%, sejalan dengan rata-rata nasional. Namun, karena pandemi, pertumbuhannya terkontraksi menjadi -1,61% pada tahun 2020, sementara Indonesia secara keseluruhan tumbuh -2,07%.

Pada tahun 2021, terjadi pemulihan, dengan Sumatera Barat tumbuh sekitar 3,29%, sementara Indonesia tumbuh sebesar 3,7%. Pada tahun 2022, Sumatera Barat mencapai tingkat pertumbuhan sekitar 4,36%, sementara Indonesia mencapai 5,31%. Secara keseluruhan, meskipun Sumatera Barat lebih rentan terhadap guncangan ekonomi, tren pemulihannya mengindikasikan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan produk ekonomi kepada masyarakatnya. Kemampuan ini berasal dari kemajuan teknologi dan penyesuaian institusional dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi (Dinar dan Hasan, 2018). Otonomi daerah merupakan salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi karena memberikan keleluasaan kepada pemerintah untuk mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. (Ngurah & Kartika, 2014, p. 81).

Otonomi daerah, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pengaturan kepentingan masyarakat menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan daya saing suatu daerah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara, khususnya sektor

pengelolaan keuangan. Sebagai kepala pemerintah pusat, presiden mendelegasikan kekuasaan ini kepada gubernur, bupati, dan walikota, yang merupakan kepala pemerintah daerah. Para pejabat ini bertanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam hal-hal yang tidak terkait dengan aset daerah. Aturan ini mempengaruhi pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan walikota bertanggung jawab atas keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah perlu melakukan pengoptimalan terhadap anggaran secara ekonomi, efisien dan efektif (value for money) guna mempertanggung jawabkan kepada publik agar mampu menumbuhkan kesejahteraan bagi masyarakat. Ekonomi adalah memilih dan menggunakan sumber daya yang memiliki kualitas sesuai dengan standar yang ditentukan dengan harga rendah. Efisien adalah menggunakan uang masyarakat (public money) untuk memaksimalkan hasil output (berdaya guna). Efektif adalah menggunakan dana yang telah tersedia agar tercapainya semua target dan kepentingan bersama.

Hal yang terjadi selama ini bias kita lihat bahwa pengelolaan keuangan daerah cukup memprihatinkan dimana dengan sebagian besar penerimaan daerah tidak dialokasikan dengan semestinya sehingga berdampak pada lambatnya laju pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah. Selain itu anggaran yang dialokasikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang menjadi skala utama dapat menjadi cerminan buruk bagi perspektif ekonomi, efisien dan efektif pengelolaan keuangan daerah. karena kualitas perencanaan anggaran daerah relatif lemah. Rendahnya perencanaan anggaran serta ketidakcukupan pemerintah daerah dalam menumbuhkan pendapatan daerah secara terus menerus. Di sisi lain Sementara itu pengeluaran daerah terus mengalami peningkatan, yang nantinya akan muncul fiscal gap. Kondisi tersebut dapat memunculkan underfinancing atau overfinancing dan pada saatnya mengganggu tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, desentralisasi fiskal dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Hal ini mencakup pelayanan langsung dan tidak langsung, seperti pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial. Dengan demikian, penyediaan barang dan jasa publik menjadi lebih terjamin.

Ketergantungan pada transfer keuangan merupakan salah satu indikator proses desentralisasi dan berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Indikator ini menunjukkan seberapa besar daerah bergantung pada dana yang dikirim oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah dana transfer dengan total pendapatan daerah. Penelitian (Nantharath et al., 2019) menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi di daerah, pemerintah daerah harus berorientasi secara universal, seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berdampak pada meningkatnya persaingan antar negara yang juga berdampak pada perekonomian Indonesia, khususnya di daerah. Oleh karena itu, desentralisasi tidak lagi menjadi tantangan bagi pemerintah, melainkan setiap daerah didorong untuk meningkatkan daya saingnya (Tampilang, Koleangan, & Wauran, 2019).

Setiap daerah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mencari sumber-sumber pendapatan, termasuk pajak dan retribusi daerah, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kewajiban daerah antara lain menggunakan dana untuk melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan daerah. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara yang

tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja keuangan daerah secara menyeluruh yang mengaitkan antara pendapatan dan biaya pemerintah daerah dalam bentuk anggaran. APBD bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dengan demikian, APBD berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah mengenai pendapatan dan pengeluaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Manimbaga et al., 2021).

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan dan melaksanakan tugas-tugas pembangunan, serta mendorong pemerataan dan keadilan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penganggaran APBD merupakan metode perencanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah. Mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Siregar dan rekan-rekannya (2017) melakukan penelitian tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa, dengan fokus pada desa-desa di Kabupaten Deli Serdang. Temuan mereka menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas penggunaan ADD di daerah tersebut. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa desa-desa dengan rasio penyerapan anggaran efektif sebesar 100% menunjukkan kinerja yang lebih baik. Banyak program yang dilaksanakan sesuai dengan keterbatasan anggaran sehingga seluruh dana ADD dapat digunakan secara optimal. Namun, Desa Medan Estate dinilai belum mampu melakukan penyerapan anggaran dengan baik dan optimal. Dari sisi efisiensi, pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Deli Serdang untuk tahun anggaran 2016 terlihat kurang efisien dalam penggunaan ADD dan DD. Namun demikian, beberapa desa terlihat meningkatkan efisiensi penggunaan ADD dan DD pada anggaran tahun tersebut. (Siregar, 2017).

Angka pendapatan dan pengeluaran Kota Padang merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan daerah lain. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam masing-masing memiliki angka pengeluaran terbesar kedua dan ketiga. Meskipun investasi pemerintah meningkat, kinerja keuangan pemerintah mengalami penurunan. Belanja modal saat ini belum memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, sehingga kinerja keuangan pemerintah tergolong buruk.

Kebijakan anggaran berfungsi sebagai pedoman umum Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan elemen penting dalam perencanaan anggaran operasional dan penerahan sumber daya. Sedangkan arah kebijakan keuangan daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti yang merupakan mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan dengan konsentrasi Ekonomi Publik tertarik untuk ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban kepada publik. Pengawasan ini akan mengkaji bagaimana kontribusi pengelolaan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Barat di era desentralisasi fiskal.

METODE PENELITIAN

Metode pada peneltian ini menggunakan metode kuantitatif, menggunakan data time series, Penelitian ini fokus pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatra Barat. sedangkan variabel

bebas adalah rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD serta indeks kemandirian fiscal daerah dan tingkat pertumbuhan pendapatan daerah per kabupaten/kota di Sumatera Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian diatas, didapati nilai probabilitas variabel tingkat efektivitas (X_1) sebesar $0.4707 > 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,0645$. Hal ini berarti efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi, maka dari itu Hipotesis di tolak.

Menurut teori Musgrave, pemerintah memiliki tiga fungsi utama yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi bertujuan mengatur penggunaan sumber daya publik agar barang dan jasa yang tidak dapat disediakan secara efektif oleh pasar dapat terpenuhi dengan baik. Fungsi distribusi berperan dalam memastikan pemerataan pendapatan dan kesempatan bagi masyarakat melalui kebijakan fiskal yang adil, seperti pajak dan subsidi, guna mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Sementara itu, fungsi stabilisasi berfokus pada penciptaan kestabilan makroekonomi dengan menjaga inflasi, pengangguran, dan siklus ekonomi berada pada level yang kondusif untuk pertumbuhan jangka panjang. Ketika variabel efektivitas pemerintah menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut belum optimal atau belum cukup efektif. Dengan kata lain, inefisiensi dalam alokasi sumber daya, ketidakmerataan distribusi pendapatan, atau ketidakstabilan ekonomi yang masih ada dapat menghambat kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi utama tersebut sangat diperlukan agar pemerintah dapat lebih berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata sesuai kerangka teori Musgrave.

Ketika variabel efektivitas pemerintah menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini dapat mengindikasikan bahwa peran pemerintah dalam menjalankan ketiga fungsi tersebut belum optimal atau belum cukup efektif. Dengan kata lain, inefisiensi dalam alokasi sumber daya, ketidakmerataan distribusi pendapatan, atau ketidakstabilan ekonomi yang masih ada dapat menghambat kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga sejalan dengan Sari (2020) dalam penelitiannya di Kabupaten Aceh Timur menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan Prasetyo (2020) dan Nuraini (2017) juga menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya masing-masing, yang menunjukkan bahwa efektivitas hanya merupakan indikator administratif, bukan indikator pembangunan.

2. Pengaruh Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Rasio efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator penting yang menunjukkan seberapa optimal pemerintah daerah menggunakan sumber daya anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Efisiensi yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu menjalankan aktivitas pembangunan dengan biaya yang relatif rendah, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan konsep desentralisasi fiskal, hasil pengujian yang menunjukkan bahwa variabel efisiensi (X_2) memiliki nilai probabilitas $0,0000$ (lebih kecil dari $0,05$) dengan koefisien positif $0,0500$ mengindikasikan bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti, peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah—

misalnya dalam penggunaan anggaran yang tepat sasaran, pengendalian pemborosan, dan pengalokasian sumber dana yang optimal—akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, dan sebaliknya. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah mencerminkan seberapa baik pemerintah daerah menggunakan sumber daya keuangan yang tersedia untuk mencapai output maksimal dengan biaya minimal. Tingkat efisiensi yang tinggi berarti pemerintah daerah mampu meminimalkan pemborosan anggaran dan mengalokasikan dana secara tepat sasaran, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menciptakan kondisi keuangan yang sehat dan transparan, yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang dikemukakan oleh Romer (1990) dan Lucas (1988). Teori-teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, seperti akumulasi modal dan tenaga kerja, tetapi juga oleh faktor internal, seperti peningkatan efisiensi, inovasi teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Peningkatan efisiensi mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya, yang menghasilkan produktivitas dan output ekonomi yang lebih tinggi tanpa bergantung pada penambahan input secara kuantitatif.

Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi perlu memberikan perhatian lebih pada upaya peningkatan efisiensi melalui pengembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan manajemen dan kebijakan yang mendukung iklim investasi dan inovasi. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional secara konsisten.

3. Pengaruh Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi, bahwa variabel tingkat kemandirian fiskal (X_3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0047 ($< 0,05$) dan koefisien regresi sebesar 0,04390. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, semakin mandiri daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya, semakin besar pula kontribusinya dalam menunjang pembangunan ekonomi lokal.

Fenomena ini selaras dengan konsep desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya keuangan sendiri, sehingga mampu menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah. Tingkat kemandirian yang tinggi memungkinkan daerah untuk lebih efektif dalam mengalokasikan anggaran, melakukan investasi, dan mengoptimalkan pelayanan publik yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat cenderung memiliki daya tahan fiskal yang baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, temuan ini juga konsisten dengan berbagai studi empiris yang telah dilakukan di daerah lain, yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran dan akuntabilitas pemerintah daerah. Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah yang mandiri secara fiskal dapat menciptakan iklim pembangunan yang lebih responsif dan inovatif, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan social. Beberapa penelitian yang sejalan yaitu Enceng et al. (2012) tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten, studi mengenai pengaruh Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, serta kajian desentralisasi fiskal dan otonomi

daerah yang memperkuat teori desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kerangka teoritis dan empiris yang relevan untuk memahami dinamika hubungan antara kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan perlunya pemerintah daerah di Sumatera Barat tidak hanya fokus pada peningkatan rasio kemandirian keuangan, tetapi juga memperbaiki tata kelola dan efektivitas penggunaan dana daerah. Upaya peningkatan kemandirian keuangan harus diringi dengan strategi pengelolaan yang produktif agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut.

4. Pengaruh Rasio Percepatan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel percepatan pertumbuhan (X_4) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah penelitian. Nilai probabilitas sebesar 0,0010 yang jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 mengindikasikan bahwa hubungan positif ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan mencerminkan keterkaitan yang nyata dan kuat antara percepatan pertumbuhan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Koefisien regresi sebesar 0,01430 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel percepatan pertumbuhan akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,01430 pada tingkat pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Artinya, percepatan pertumbuhan mendorong peningkatan output ekonomi, yang dapat diartikan sebagai peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi yang lebih dinamis di daerah tersebut.

Hasil ini sejalan dengan berbagai penelitian empiris yang menunjukkan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Studi-studi tersebut menegaskan bahwa daerah yang berhasil mempercepat laju pertumbuhan ekonominya, umumnya melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan investasi, dan efektivitas kebijakan fiskal, akan mengalami peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks kebijakan pembangunan daerah, hasil ini mengimplikasikan pentingnya strategi yang menekankan percepatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya lokal. Percepatan pertumbuhan yang efektif dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan berkelanjutan, mendorong munculnya lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memberikan perhatian serius pada faktor-faktor yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Penguatan kapasitas institusi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan peningkatan koordinasi antar sektor harus menjadi prioritas agar potensi percepatan pertumbuhan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, dan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil estimasi regresi menggunakan model fixed effect menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 14,3602 dengan probabilitas 0,0000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, mengindikasikan bahwa secara simultan variabel bebas yang terdiri dari tingkat efektivitas (X_1), efisiensi (X_2), kemandirian (X_3), dan percepatan pertumbuhan pendapatan (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuktikan bahwa keempat variabel tersebut secara

bersama-sama berkontribusi dalam menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Variabel efektivitas (X1) meskipun secara individual tidak signifikan (berdasarkan analisis sebelumnya), tetap menjadi bagian penting dalam model simultan ini. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dapat memberikan kontribusi bersamaan dengan variabel lain dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, walaupun efeknya mungkin tidak terlalu kuat secara tunggal. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan agar sinergi dengan variabel lain dapat memperkuat dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel efisiensi (X2) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, yang menggambarkan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efisien dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana secara tepat dan meminimalkan pemborosan, sehingga pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik dapat meningkat dan berdampak langsung pada peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal (X3) juga terbukti secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa daerah yang mampu mengelola sumber daya dan pendapatan sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat memiliki kapasitas yang lebih baik dalam melakukan investasi dan pembangunan. Kemandirian ini memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan fiskal lokal sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah, yang berujung pada percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan pertumbuhan pendapatan (X4) memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa semakin cepat pendapatan daerah tumbuh, semakin besar pula dampaknya dalam mendorong aktivitas ekonomi yang lebih dinamis dan produktif. Pertumbuhan pendapatan yang cepat juga merupakan indikator kesehatan ekonomi daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa kombinasi tingkat efektivitas, efisiensi, kemandirian fiskal, dan percepatan pertumbuhan pendapatan secara bersama-sama menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi dan daerah perlu terus mengoptimalkan keempat aspek ini melalui peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang baik agar tercipta sinergi yang mampu mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan ini sekaligus menegaskan relevansi teori desentralisasi fiskal yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan meningkatkan kinerjanya demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian Regresi Panel Fixed Effect Model dan pembahasan temuan penelitian mengenai hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Infrastruktur listrik berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur listrik berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Infrastruktur air berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur air berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Infrastruktur jalan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur jalan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Infrastruktur teknologi komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artinya peningkatan atau penurunan infrastruktur teknologi komunikasi berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi inklusif di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

REFERENSI

- Anggiriawan, P. B., & Kawisana, P. G. W. P. (2020). Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2281.
<https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p09>
- Widyasanti, A., Rahayu, A. Y., Zain, S. 2017. Pembuatan sabun cair berbasis virgin coconut oil (VCO) dengan penambahan minyak melati (*Jasminum sanbac*) sebagai essential oil. *Jurnal Teknotan*. 11(2): 1-10.
- Azwar, 2021 Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017- 2021 *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Volume 7, No. 1, (p.1-25) e-ISSN: 2581-1207
- Defitri, S. Y., Mahaputra, U., & Yamin, M. (2018). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3(1), 64–75.
- Hafan, F. A. (2019). Analysis of The Performance of Regional Financial Management and The Effect On Poverty Levels In Magelang Regency
- Mardiasmo. 2021. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta:
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 5 No.2.
- Pangaribuan, R. S. 2020. Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.
- Primanto, A. 2020. Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. Malang: Intelegensia Media.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. 2018. “Analisis kemandirian keuangan daerah”. *Inovasi*, 13(2), 92.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Yohanes Susanto, S. W. (2021). Analysis of Regional Financial Management of North Bengkulu District Towards Regional Independence in The Autonomy Era. 1-7.
- Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 3(1).
- Canavire-Bacarreza, G., Martinez-Vazquez, J., & Yedgenov, B. (2020). Identifying and disentangling the impact of fiscal decentralization on economic growth. *World Development*, 127.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104742>
- Feby Kinanda. (2021). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 2(2), 88–99.
<https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v2i2.54>
- Kemenkeu. (2019). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Dana Alokasi Umum. *Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, Dan Keuangan Daerah*.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=1776>
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & ... (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014- 2018. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset ...*, 9(2), 982–992.

- Marwan, J., Moeljadi, Ananda, C. F., & Djazuli, A. (2017). the Perspective of the Agency Theory in Budget Preparation of Local Government and Its Implementation on Budget Performance and Financial Decentralization To Realize Performance of Local Government of Regencies and Cities in Banten Province. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 62(2), 117–128. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2017-02.14>
- Ropa, M. O. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 738–747.
- Siregar, F. A. (2017). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penge. 2(4), 93–106. Trianto, A. (2016). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(1), 65–77. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i1.92>